

## Ringkasan Eksekutif

# KAJIAN TERHADAP KINERJA *FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI)* DI INDONESIA

Analisis Ringkas Cepat  
No. 12/arc.PKA/IV/2020



## RANGKUMAN

BI mencatat aliran modal asing melalui investasi langsung yang masuk ke Indonesia pada periode 2014-2019 sebesar USD106,945 juta. Dengan nilai transaksi berjalan yang selalu tercatat negatif maka Penanaman Modal Asing (PMA) berperan penting dalam menjaga nilai NPI agar tetap surplus. Pertumbuhan realisasi PMA cenderung fluktuatif pada periode 2014-2019 dengan adanya lonjakan yang terjadi di tahun 2017. Di tahun 2020 ini, berbagai negara dihantam pandemi Covid-19 yang sangat memukul perekonomian global dan mengancam resesi di beberapa negara, seperti RR Tiongkok, Singapura dan Jepang. Dimana ketiga negara tersebut merupakan investor terbesar di Indonesia. Oleh karena itu Indonesia perlu memperkuat hubungan investasi dengan beberapa negara lainnya. Adapun beberapa negara potensial yang memiliki ketahanan ekonomi yang kuat saat ini dan telah menjalin hubungan investasi dengan Indonesia yaitu Belanda, British Virginia Islands, Australia dan Korea Selatan. Dalam menarik minat investor tentunya ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti perijinan, kepastian hukum dan stabilitas politik dan keamanan. Dengan segera diberlakukannya UU *Omnibuslaw* Cipta Karya dan Perpajakan dapat memberikan angin segar untuk kemudahan berinvestasi di Indonesia.

**PERAN INVESTASI LANGSUNG DALAM MENOPANG NERACA PEMBAYARAN** 2

**PERAN FDI TERHADAP PEREKONOMIAN** 3

**PERKEMBANGAN FDI** 4

**FAKTOR-FAKTOR FDI** 5

**TANTANGAN FDI 2020** 6

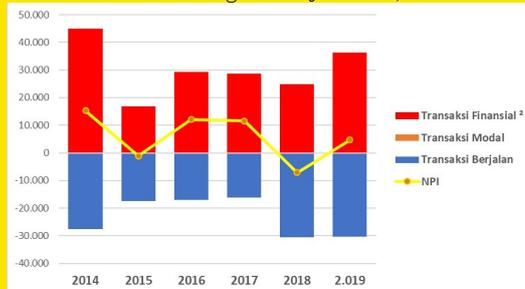
**NEGARA POTENSIAL TUJUAN FDI** 7

**REKOMENDASI** 7

# PERAN INVESTASI LANGSUNG DALAM MENOPANG NERACA PEMBAYARAN

Neraca pembayaran yang surplus menunjukkan stabilitas perekonomian suatu negara dan ketahanan eksternal yang terjaga. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan dan daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Neraca pembayaran merupakan kewajiban bagi suatu negara untuk menunjukkan hubungan ekonomi dengan negara lain, begitu juga dengan Indonesia. Perkembangan neraca pembayaran Indonesia (NPI) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dimana pada Gambar 1 surplus NPI ditopang oleh Transaksi Finansial sementara transaksi berjalan selalu defisit

**Gambar 1.**Perkembangan NPI (Juta USD)



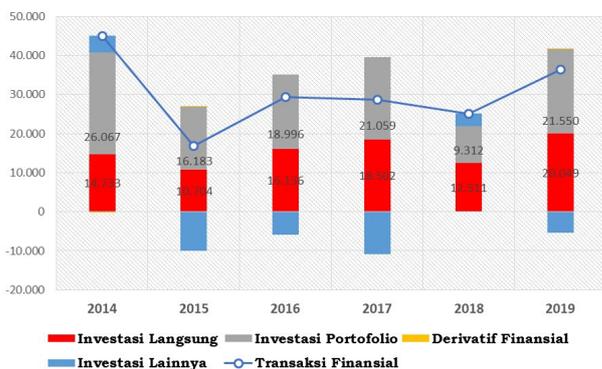
Sumber : BI, diolah

Transaksi finansial selalu menjadi penopang NPI dari tekanan defisit transaksi berjalan. Mulai membaiknya kinerja NPI di tahun 2019 ditopang oleh pertumbuhan transaksi finansial yang tinggi yaitu sebesar 45 persen dibanding tahun 2018. Transaksi finansial sendiri sangat ditopang oleh komponen investasi langsung dan investasi portofolio. Pada gambar 2 menunjukkan surplus transaksi finansial terutama didorong oleh tingginya arus masuk melalui investasi portofolio dibanding investasi langsung. Namun demikian di tahun 2018 investasi langsung sempat mendominasi namun di tahun 2019 arus investasi yang masuk kembali didorong oleh portofolio.

Berdasarkan arah investasinya, investasi langsung dibagi menjadi 2 yaitu investasi ke luar negeri dan ke Indonesia atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Gambar 3 menunjukkan aliran investasi asing ke Indonesia lebih tinggi dari aliran investasi langsung ke luar negeri sehingga net transaksi investasi langsung hampir selalu menunjukkan nilai surplus yang kemudian dapat menopang neraca pembayaran dari tekanan neraca perdagangan yang selalu defisit.

Aliran PMA tersebut turut menjaga kinerja NPI yang semakin membaik sehingga meningkatkan cadangan devisa dan kemudian memperkuat kurs rupiah. Tercatat kurs rupiah terhadap dolar menguat dari Rp14.267/USD pada tahun 2018 menjadi Rp14.130/USD di tahun 2019. Hal ini sejalan dengan prospek ekonomi yang tetap terjaga dan ketidakpastian pasar keuangan global yang mulai mereda.

**Gambar 2.**Perkembangan Transaksi Finansial (Juta USD)



Sumber : BI, diolah

**Gambar 3.**Perkembangan NPI (Juta USD)

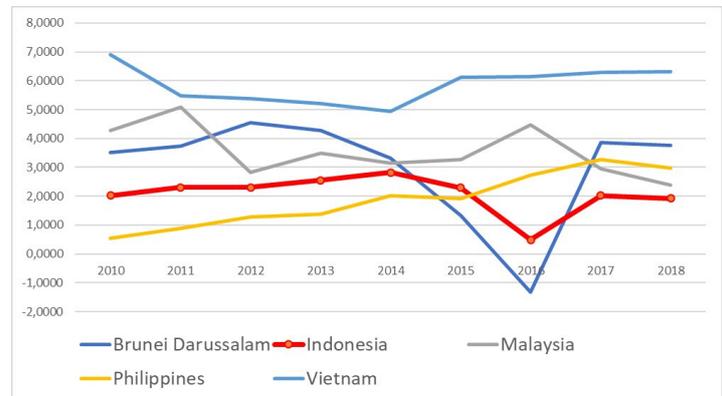


Sumber : BI, diolah

## PERAN FDI TERHADAP PEREKONOMIAN

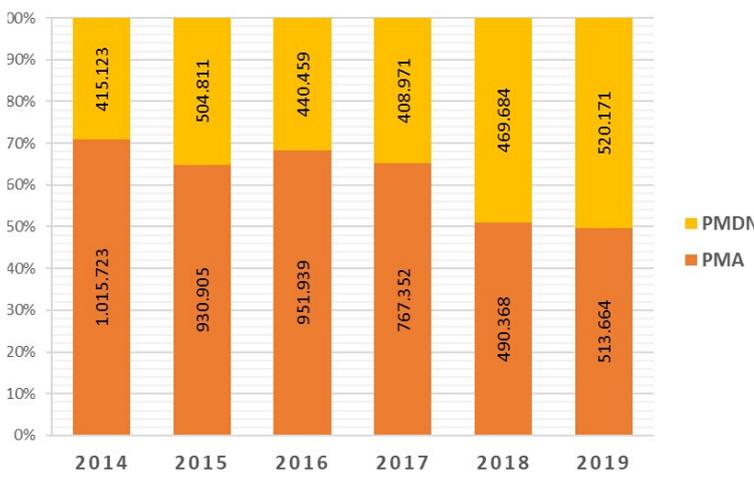
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5 persen sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 56 persen diikuti oleh Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32 persen (BPS, 2020). Salah satu pembentuk PMTB itu sendiri ialah investasi langsung asing atau FDI. Namun proporsi FDI terhadap PDB Indonesia masih tergolong rendah. Terlihat pada gambar 4 bahwa dibandingkan beberapa negara ASEAN, kontribusi FDI terhadap PDB di Indonesia tergolong yang paling rendah. Dalam kurun waktu 2010-2018 proporsi FDI terhadap PDB di Vietnam mencapai 5,2 persen diikuti oleh Malaysia sebesar 3,1 persen. Sementara Indonesia hanya 1,6 persen.

**Gambar 4.** Proporsi FDI terhadap PDB di Beberapa Negara ASEAN (%)



Sumber : World Bank, diolah

**Gambar 5.** Perkembangan Transaksi Finansial (Juta USD)



Sumber :BKPM, diolah

Terkait penyerapan tenaga kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa penyerapan tenaga kerja pada FDI atau PMA lebih besar dibandingkan tenaga kerja yang terserap dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Gambar 5). Besarnya serapan tenaga kerja ini merupakan sinyal positif juga bagi perekonomian nasional karena hal tersebut akan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, sehingga pendapatan perkapita dapat bertambah. Hal tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik.

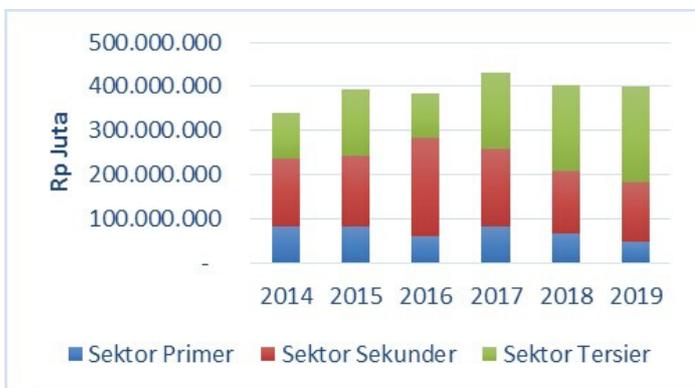
"Pada tahun 2014 PMA menyerap 70,9% dari total serapan tenaga kerja PMA dan PMDN. Namun hingga tahun 2019, serapan tenaga kerja dari PMA semakin berkurang menjadi 49%"

## PERKEMBANGAN FDI

PMA mengalami fluktuasi selama kurun waktu tahun 2014 sampai 2018. Penurunan PMA sempat terjadi di tahun 2016, 2018 dan 2019. Di tahun 2015, PMA mencapai nilai pertumbuhan yang terbesar selama kurun waktu 6 tahun terakhir, sementara penurunan PMA terbesar terjadi di tahun 2018 (Gambar 6). Peran PMA sangat besar dalam total investasi dimana persentasenya selalu lebih besar apabila dibandingkan dengan porsi PMDN.

Sampai dengan tahun 2017, sektor sekunder selalu memiliki porsi terbesar dalam PMA dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun sejak tahun 2018, PMA terbesar berada di sektor tersier dan sektor sekunder cenderung mengalami penurunan (Gambar 7). Hal ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat sektor sekunder merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak. Serta, sektor sekunder memberikan nilai tambah khususnya bagi industri yang berorientasi ekspor

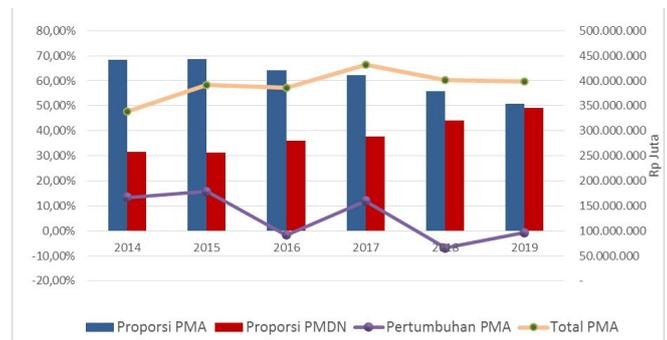
**Gambar 7.** PMA Per Sektor 2014-2019



Sumber : BKKPM, diolah

Pada Gambar 8 dapat dilihat sepuluh negara tradisional asal PMA dengan nilai PMA yang terbesar dan yang paling sering melakukan PMA di Indonesia. Diantara sepuluh negara tradisional tersebut, enam negara diantaranya berasal dari kawasan Asia. Adapun subsektor yang diminati yaitu subsektor yang paling diminati yaitu listrik, gas dan air, pertambangan serta transportasi, gudang dan telekomunikasi. Sedangkan subsektor dengan nilai PMA terkecil yaitu industri kayu, perikanan dan perikanan.

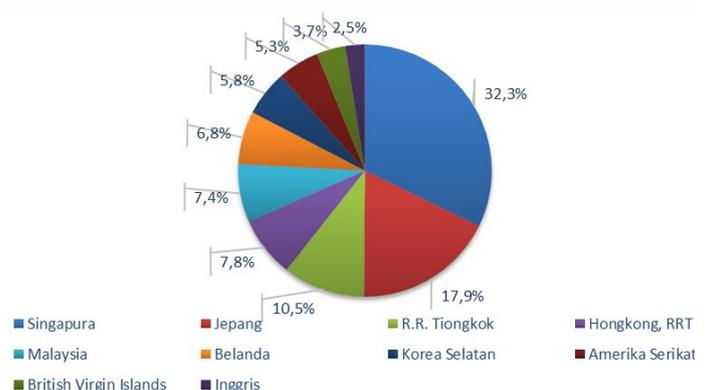
**Gambar 6.** Proporsi PMA, PMDN dan Laju Pertumbuhan PMA



Sumber : BKKPM, diolah

**"Selama kurun waktu 2014-2019, subsektor strategis yang mengalami peningkatan PMA yaitu perumahan, kawasan industri dan perkantoran, industri logam dasar, bukan mesin dan peralatannya."**

**Gambar 8.** Sepuluh Negara Tradisional Asal PMA dengan Nilai PMA Terbesar 2014-2019



Sumber :BKPM, diolah

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FDI

Gambar 9. Faktor yang Mempengaruhi PMA



Sumber : Berbagai sumber

## Faktor Ekonomi:

- pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga hampir selalu berada pada angka lima persen, cukup baik ditengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu dalam beberapa tahun terakhir ini
- Dalam hal infrastruktur juga mengalami perkembangan signifikan pada periode pertama presiden Jokowi baik dalam hal kualitas, maupun kuantitas.

- Dari faktor insentif fiskal, Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada periode pertama Pemerintahan Jokowi, Pemerintah mengeluarkan PMK 159/2015 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, PP No. 18 Tahun 2015 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, serta PMK No. 89 Tahun 2015 yang menjelaskan mengenai pemberian fasilitas *tax allowance*.

## Faktor Non Ekonomi:

- Mengacu kepada *FDI restriction Index* yang dikeluarkan oleh OECD, memperlihatkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak persoalan yang menghambat investasi. Faktor yang paling mempengaruhi penilaian *FDI restriction index* Indonesia adalah adanya pembatasan modal asing dalam investasi di Indonesia
- Pada pemerintahan presiden Jokowi periode pertama sendiri pada dasarnya telah berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk menyederhanakan regulasi. Namun, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mendorong investasi asing masuk ke Indonesia masih belum dapat maksimal penerapannya karena terhambat permasalahan integrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka tidak heran, jika melihat perkembangan FDI yang masuk ke Indonesia dalam kurun enam tahun terakhir cenderung mendatar pada kisaran USD28-29 miliar, kecuali pada tahun 2017 yang mampu mencapai USD32 miliar. Lonjakan yang terjadi pada tahun 2017 sendiri lebih diakibatkan oleh adanya PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

"Melihat faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi FDI diatas, hampir semuanya memberikan dampak positif terhadap masuknya FDI ke Indonesia.Selanjutnya, dilihat dari faktor-faktor non ekonomi, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi Indonesia "

## TANTANGAN FDI 2020



Pandemi Covid-19

Berbagai tantangan global yang dihadapi saat ini, yang menjadi ancaman terbesar di tahun ini ialah pandemi Covid-19 yang sangat menghantam perekonomian global dan berdampak pada aliran investasi di banyak negara. Beberapa lembaga internasional memprediksi perekonomian global akan mengalami resesi di tahun 2020 dengan prediksi pertumbuhan ekonomi yaitu :

- OECD memperkirakan di tahun 2020, perekonomian global hanya mampu tumbuh 2,4 persen
- Moody's memprediksi, pertumbuhan ekonomi global berada diangka 2 persen
- IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 berkontraksi hingga negatif 3%.

Atas kondisi ini, Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diprediksi melambat hingga 4,2% (Bank Indonesia), bahkan dapat mencapai angka 0,5% (IMF).

Masalah-masalah terkait perizinan masih bermunculan meski sudah ada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) serta Peraturan Presiden No.97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Aplikasi OSS dinilai belum lengkap dalam menyediakan jenis usaha dan perizinan yang ada di Indonesia, dan adanya peraturan daerah yang masih saling bertabrakan dengan Perpres Perizinan Terintegrasi. Berdasarkan temuan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), setidaknya terdapat tiga masalah utama dalam pelaksanaan OSS yakni dari aspek regulasi, aspek sistem dan aspek tata laksana.



Hambatan Regulasi dan Perizinan



Situasi Politik dan Keamanan

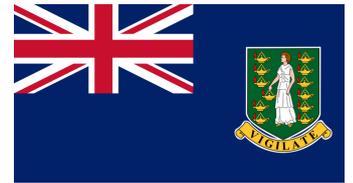
Faktor lain yang berpengaruh di tahun 2020 dan menghambat investasi yaitu situasi politik dan kondisi keamanan yang terjadi. Seperti diketahui bahwa di tahun 2020 akan diselenggarakan Pilkada serentak. Tentunya hal itu akan membuat investor cenderung menahan investasi dan melihat suasana paska Pilkada. Di sisi lain, aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh diprediksi masih sering terjadi khususnya terkait *Omnibuslaw* Cipta Lapangan Kerja.

## NEGARA POTENSIAL PMA DI INDONESIA

Berangkat dari kondisi perekonomian global yang mengalami hantaman, maka Indonesia perlu mencari potensi penanam modal asing lainnya dalam menopang stabilitas keuangan negara. Tentunya dibutuhkannya sumber investasi asing dari negara potensial lainnya yang cukup kuat bertahan terhadap tekanan ekonomi global. Beberapa negara potensial tersebut, diantaranya:

**Belanda** merupakan salah satu negara Uni Eropa yang memiliki jaringan ekonomi kuat di tengah tekanan ekonomi global. Hingga tahun 2019 investasi Belanda ke Indonesiameningkat menjadi USD2,6 miliar. Jika dilihat dari beberapa indikator ekonomi salah satunya pertumbuhan ekonomi, Belanda menunjukkan tren pertumbuhan positif setelah sempat mengalami titik terendah di tahun 2015.

**British Virginia Islands** masuk salah satu 10 negara tradisional yang melakukan investasi yang tinggi di Indonesia. Sejak tahun 2014, nilai investasi British Virginia Island mencapai USD5,13 miliar dengan total proyek sebanyak 7.240. Jika dilihat dari pergerakan aliran investasi dalam 5 tahun terakhir, British Virginia Island merupakan negara yang melakukan investasi secara konsisten meningkat dan cukup signifikan pada tahun 2016



**Korea Selatan** merupakan negara yang cukup tinggi menanamkan investasi di ASEAN terutama Vietnam. Di kuartal IV tahun 2019, Korea Selatan mampu tumbuh 2,3 persen lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya di angka 2 persen. Di Bulan Maret ini, OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tahun 2020 mampu bertahan di angka 2 persen atau sama dengan tahun 2019 di tengah ancaman Covid-19.

**Australia** memiliki posisi fiskal yang kuat dengan surplus anggaran sehingga menopang pertumbuhannya. Deloitte Insights mencatat ekonomi Australia akan tetap stabil dan diperkirakan mampu memenuhi target tanpa resesi pada tahun 2020. Kondisi kesehatan ekonomi Australia juga menunjukkan tren positif memasuki tahun 2020. Indeks Daya Saing Australia hingga tahun 2020 pun tinggi pada angka 78,75



## REKOMENDASI

Melihat pentingnya peran FDI tersebut, tentunya pemerintah harus serius dalam menarik minat investor asing terutama di tengah ketidakpastian global saat ini akibat pandemi Covid-19. Mengingat beberapa negara penting bagi perekonomian Indonesia mengalami guncangan. Tentunya negara tersebut memiliki ketahanan perekonomian yang lebih kuat dan sudah berpengalaman berinvestasi di Indonesia atau di negara ASEAN lainnya seperti Vietnam. Negara potensial tersebut diantaranya Belanda, British Virginia Island, Australia dan Korea Selatan.

Dalam menarik minat investor tersebut terdapat beberapa kendala investasi yang perlu dibenahi seperti perijinan, regulasi, infrastruktur, insentif, keamanan serta stabilitas politik. Rencana pemerintah untuk menerbitkan UU *Omnibuslaw* Cipta Karya dan Perpajakan perlu dilaksanakan secepatnya tentunya dengan memperhatikan masukan dari berbagai stakeholder terkait baik pengusaha, buruh maupun masyarakat lainnya.